



# METADATA

## DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**METADATA STATISTIK  
KEGIATAN**

Judul Kegiatan		Kompilasi Data dan Informasi Perencanaan Pendidikan
Tahun Kegiatan		2023
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan		Pendidikan dan Pelatihan
Jenis Kegiatan Statistik		Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi		B-110/19000/OT.130/2024
<b>I. PENYELENGGARA</b>		
1.1	Instansi Penyelenggara	Dinas Pendidikan
1.2	Alamat	Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Telepon	(0717) 439234
	Faksimile	(0717) 439234
	<i>Email</i>	dindik@babelprov.go.id
<b>II. PENANGGUNG JAWAB</b>		
2.1	Unit Eselon Penanggung Jawab	
	Eselon 1	-
	Eselon 2	-
2.2	Penanggung Jawab Teknis	
	Nama	Azami Anwar
	Jabatan	Sekretaris Dinas
	Alamat	Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
	Telepon	081373314787
	Faksimile	-
	<i>Email</i>	azami2517@gmail.com
<b>III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN</b>		

3.1	Latar Belakang Kegiatan	<p>Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan yang berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah pusat menginginkan agar perencanaan bisa berjalan sinkron dengan pelaksanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan. Kemudian pemerintah pusat juga mengamanahkan agar pemerintah daerah bisa merencanakan program yang menysasar urusan wajib layanan dasar. Salah satu urusan wajib layanan dasar yang dimaksud adalah urusan pendidikan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, harus mampu menysasar warga negara yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Proses penyusunan perencanaan urusan pendidikan juga harus memperhatikan target SDGs urusan pendidikan. Kemudian Perencanaannya juga harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Kementrian Pendidikan Nasional serta memperhatikan dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perencanaan pembangunan urusan pendidikan selain disusun secara top-down atau teknokratik, juga harus mengakomodasi usulan dari aspirasi masyarakat (Bottom-up) dan usulan yang berasal dari unsur legislatif (politis) dalam bentuk usulan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perencanaan pembangunan urusan pendidikan juga harus mampu memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di daerah. Pembangunan urusan pendidikan tidak memiliki dampak yang besar manakala hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan di daerah. Beberapa unsur yang harus dipetakan terlibat dalam pembangunan pendidikan selain pemerintah pusat dan daerah adalah pihak swasta, masyarakat (komunitas), Akademisi dan dunia Pers. Perencanaan tidak berdiri sendiri dalam siklus pembangunan, melainkan selalu disela dan diakhiri dengan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana perencanaan yang telah dilakukan sudah menjawab permasalahan dengan intervensi program, kegiatan dan subkegiatan dengan anggaran yang dialokasikan. Hasil pengendalian digunakan untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan, sementara hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya. Penyusunan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan urusan pendidikan yang integratif, holistik dan sinergis serta mampu melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan SPM dapat diwujudkan dengan optimal jika disusun dengan memperhatikan alur dan timeline perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Berikut ini adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Bidang Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karenanya agar dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi berjalan dengan baik dan berkualitas maka harus berdasarkan basis data yang valid dan akurat. Penyusunan data dan informasi perencanaan merupakan bagian dari penyelenggaraan satu data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data dimulai dari perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, penyebaran Data; dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data.</p>
-----	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2	Tujuan Kegiatan	1. Sebagai dasar dalam menyusun dan melaksanakan rencana Pembangunan; 2. Bentuk tanggung jawab sebagai produsen data; 3. Sebagai dasar dalam mengukur pelaksanaan pembangunan.
3.3	Rencana Jadwal Kegiatan	
	Perencanaan Kegiatan	2022-12-19 s.d. 2022-12-29
	Desain	2023-01-09 s.d. 2023-03-24
	Pengumpulan Data	2023-04-10 s.d. 2024-10-18
	Pengolahan Data	2023-11-03 s.d. 2023-11-09
	Analisis	2023-11-10 s.d. 2023-11-24
	Diseminasi Hasil	2023-12-26 s.d. 2023-12-29
	Evaluasi	2024-01-01 s.d. 2024-01-05

### 3.4 Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah satuan pendidikan	Satuan pendidikan	Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	Tahun 2022
Nilai akreditasi sekolah	Akreditasi sekolah	Akreditasi sekolah adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan.	Tahun 2022
Peserta didik penerima beasiswa	Beasiswa	Beasiswa merupakan sebuah bantuan biaya pendidikan sehingga seorang pelajar yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan Pendidikan yang ditempuh pelajar tersebut.	Tahun 2022
Peserta didik putus sekolah	Putus sekolah	Putus sekolah adalah suatu keadaan dimana siswa tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau siswa tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.	Tahun 2022
Jumlah pemutusan hubungan pendidikan dari sekolah	Pemutusan hubungan pendidikan	Pemutusan hubungan pendidikan adalah kondisi saat siswa/orang tua/wali mengajukan pengunduran diri secara lisan dan tertulis, setelah itu sekolah mengembalikan tanggungjawab peserta didik sepenuhnya kepada orang tua/wali.	Tahun 2022

Peserta didik mutasi sekolah	Mutasi	Mutasi adalah perpindahan siswa dari sekolah/madrasah asal ke sekolah/madrasah yang dituju.	Tahun 2022
Peserta didik mundur	Mundur	Mundur adalah siswa yang berhenti sekolah atas keinginan sendiri.	Tahun 2022
Peserta didik	Peserta didik	Penduduk yang berusia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjangnya.	Tahun 2022
Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana	Kondisi sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran di satuan pendidikan.	Tahun 2022
Kondisi Kependidikan SMA, SMK dan SLB	Kondisi Kependidikan	Kondisi mutu sekolah yang diukur dari capaian literasi, numerasi, karakter dan kesenjangan, kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, iklim keamanan, kebhinnekaan dan inklusivitas .	Tahun 2022

## IV. DESAIN KEGIATAN

4.1	Kegiatan ini dilakukan	BERULANG
4.2	Frekuensi Penyelenggaraan	TAHUNAN
4.3	Tipe Pengumpulan Data	LONGITUDINAL_PANEL
4.4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
4.5	Wilayah Kegiatan	
	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG
4.6	Metode Pengumpulan Data	Mengisi Kuesioner Sendiri, Pengumpulan data sekunder
4.7	Sarana Pengumpulan Data	PAPI, Lainnya : DAPODIK, Rapor Pendidikan, website BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.8	Unit Pengumpulan Data	Individu

V. DESAIN SAMPEL  
(khusus survei)

5.1	Jenis Rancangan Sampel	-
5.2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir	-

5.3	Metode yang Digunakan	-
5.4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir	-
5.5	Fraksi Sampel Keseluruhan	-
5.6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama	-
5.7	Unit Sampel	-
5.8	Unit Observasi	-
<b>VI. PENGUMPULAN DATA</b>		
6.1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak
6.2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Kunjungan kembali (revisit)
6.3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak
6.4	Petugas Pengumpulan Data	Staf instansi penyelenggara
6.5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma I/II/III
6.6	Jumlah Petugas	Supervisor/penyelia/pengawas: 1 Pengumpul data/enumerator: 18
6.7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak
<b>VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS</b>		
7.1	Tahapan Pengolahan Data	Editing, Coding, Data Entry, Validasi
7.2	Metode Analisis	DESKRIPTIF
7.3	Unit Analisis	Individu
7.4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Provinsi, Kabupaten/Kota
<b>VIII. DISEMINASI HASIL</b>		
8.1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum	
	Tercetak ( <i>hardcopy</i> )	Ya
	Digital ( <i>softcopy</i> )	Tidak
	Data Mikro	Tidak
8.2	Rencana Rilis Produk Kegiatan	
	Tercetak	2023-12-27;
	Digital	-
	Data Mikro	-

**METADATA STATISTIK  
VARIABEL**

Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah variabel dapat diakses umum
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sekolah Menengah Atas (SMA) Guru Guru Tetap Guru Dalam Jabatan	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disajikan menurut wilayah mencakup Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan.	-	Tahun 2022	Jumlah	Sekolah; Orang	Integer, nominal	-	Kesesuaian data dari ketiga sumber yang digunakan; Konfirmasi apabila terdapat perbedaan data;	Apakah jumlah murid dari sumber yang digunakan sama?	Ya
Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan	Kondisi sarana dan prasarana sekolah	Sarana dan Prasarana Pelayanan	Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) dan prasarana benda yang tidak bergerak (gedung).	-	Tahun 2022	Jumlah	tidak ada satuan	Kategorik	-	Data dikategorikan menjadi (1) baik (2) rusak ringan (3) rusak sedang (4) rusak berat; Konfirmasi apabila terdapat data di luar klasifikasi yang ditetapkan;	Apakah terdapat kondisi sarana dan prasarana sekolah di luar klasifikasi yang ditetapkan?	Ya
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Guru Guru Tetap Guru Dalam Jabatan	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disajikan menurut wilayah mencakup Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	-	Tahun 2022	Jumlah	Sekolah; Orang	Integer, nominal	-	Kesesuaian data dari sumber yang digunakan; Konfirmasi apabila terdapat perbedaan data;	Apakah data jumlah murid SMK dari sumber berbeda yang digunakan sama?	Ya

Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah variabel dapat diakses umum
Akreditasi Program Satuan Pendidikan	Akreditasi sekolah	Akreditasi	Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.	-	Tahun 2022	-	-	Kategorik	1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak Terakreditasi	Kesesuain data dari sumber yang digunakan; Konfirmasi apabila terdapat perbedaan data;	Apakah akreditasi jumlah sekolah dari ketiga sumber sama?	Ya



**METADATA STATISTIK  
INDIKATOR**

Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun	Level Estimasi	Apakah indikator dapat diakses umum
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA)	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA) Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK)	Banyaknya peserta didik pada bentuk pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan satuan pendidikan kerja sama sekolah menengah atas (SPK SMA) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu	-	Penjumlahan peserta didik dengan bentuk pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan satuan pendidikan kerja sama sekolah menengah atas (SPK SMA) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu	Total	orang	Wilayah Jenis Kelamin Agama Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas Status Satuan Pendidikan	Tidak	-	Jumlah peserta didik Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas	kabupaten/kota	Ya
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Banyaknya peserta didik pada bentuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.	-	Penjumlahan peserta didik dengan bentuk pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.	Total	Orang	Wilayah Jenis Kelamin Agama Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Status Satuan Pendidikan	Tidak	-	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah peserta didik	Kabupaten/kota	Ya

Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun	Level Estimasi	Apakah indikator dapat diakses umum
Persentase Siswa yang Menerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan	Siswa Bantuan Pendidikan	Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah pada tahun ajaran sebelumnya, yang menerima beasiswa/bantuan pendidikan (baik PIP, beasiswa/bantuan pendidikan dari pemerintah pusat, daerah maupun non pemerintah, atapun lainnya).	-	-	Persentase	persen	Wilayah	Tidak	-	Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa yang mendapat beasiswa pendidikan	Kabupaten/kota	Ya
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA) Mengulang Kelas	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA) Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) Mengulang Kelas Tingkat Pendidikan	Banyaknya peserta didik yang mengulang kelas pada suatu tingkat pendidikan pada bentuk pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Atas (SPK SMA) pada tahun ajaran tertentu.	-	Penjumlahan peserta didik yang mengulang kelas pada bentuk pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Atas (SPK SMA).	Total	Orang	Wilayah Jenis Kelamin Status Satuan Pendidikan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tidak	-	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas mengulang kelas	kabupaten/kota	Ya

Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun	Level Estimasi	Apakah indikator dapat diakses umum
Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB)	Sekolah Luar Biasa (SLB) Satuan Pendidikan	Banyaknya satuan pendidikan dengan bentuk pendidikan sekolah luar biasa (SLB) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu	-	Penjumlahan satuan pendidikan dengan bentuk pendidikan sekolah luar biasa (SLB) di suatu wilayah dan waktu tertentu	Total	Satuan Pendidikan	Wilayah Status Satuan Pendidikan Akreditasi Program Satuan Pendidikan	Tidak	-	Jumlah satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa	Kabupaten/KOTA	Ya
Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) Sekolah Menengah Atas (SMA)	Banyaknya satuan pendidikan dengan bentuk pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan satuan pendidikan kerja sama sekolah menengah atas (SPK SMA) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu	-	Penjumlahan satuan pendidikan dengan bentuk pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan satuan pendidikan kerja sama sekolah menengah atas (SPK SMA) di suatu wilayah dan waktu tertentu	Total	Satuan Pendidikan	Wilayah Status Satuan Pendidikan Akreditasi Program Satuan Pendidikan	Tidak	-	Jumlah satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Kabupaten/kota	Ya
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mengulang Kelas	Peserta Didik Mengulang Kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Banyaknya peserta didik yang mengulang kelas pada suatu tingkat pendidikan pada bentuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun ajaran tertentu.	-	Penjumlahan peserta didik yang mengulang kelas pada bentuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) .	Total	Orang	Wilayah Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Status Satuan Pendidikan	Tidak	-	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengulang kelas	kabupaten/kota	Ya

